

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada umumnya masyarakat mengharapkan kehidupan yang ideal dan lebih baik dari hari kehari, kebutuhan masyarakat terpenuhi dan tidak mengkhawatirkan dan memikirkan hari esok, masyarakat membutuhkan kondisi yang kondusif guna aktualisasi diri untuk terwujudnya proses sosial yang adil, realitas yang dianggap sebagai masalah social menjadikan inspirasi bagi munculnya usaha perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di desa.

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita Negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur adil dan sejahtera, namun pembangunan yang menjadi dasar masyarakat yang sejahtera, masih belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri, dengan demikian maka hal yang paling mendasar untuk mengatasi permasalahan pembangunan khususnya didesa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan yang ada di desa masing- masing sehingga nantinya pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi merupakan sebuah masukan dan keluaran, partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan hingga

pelaksanaan penelitian hingga penerimaan kembali hasil (wibowo, 2015) partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi input atau masukan bagi aparatur desa setempat, dan dengan

aspirasi diharapkan masyarakat mampu menumbuhkan kemampuan untuk berkembang secara mandiri

Berkaitan dengan upaya pembangunan desa partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena pembangunan desa ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri, dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan harapan masyarakat.

Pembangunan yang baik harus diawali dengan proses dan perencanaan yang baik pula, sehingga seluruh pembangunan dapat benar benar dirasakan manfaatnya, untuk itu masyarakat harus dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, diantaranya dengan turut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Atau yang disingkat dengan MUSRENBANG

Menurut (lugiarti, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program pengembangan masyarakat dikomunitas desa cijayanti, 2004) MUSRENBANG adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan seperti stakeholder, yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKP desa), rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) RKP dan RPJM

inilah yang nantinya menjadi acuan untuk menyusun Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)

Hal tersebut termuat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam undang undang tersebut , pasal 80 menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musrenbang desa. Musrenbang desa berguna untuk mnenetapkan prioritas program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa , swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini mewajibkan keikutsertaan masyarakat didalamnya.

Selanjutnya pada peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 116 ayat 1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut:

Dalam menyusun RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh badan permusyawaratan desa dan unsure masyarakat desa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh badan permusyawaratan desa dan unsure masyarakat

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun dan merancang perencanaan pembangunan desa yang didalamnya terdapat RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan harus melibatkan unsur masyarakat desa.

Desa sengonagung merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan purwosari kabupaten pasuruan provinsi jawa timur, Idealnya pelaksanaan musrenbang melibatkan masyarakat mulai dari tahap proses, hingga tahap evaluasi, pelaksana musrenbang yang melibatkan masyarakat dan stakeholder secara bersama-sama memikirkan dan mendiskusikan bagaimana cara mengimplementasikan dan membiayai hasil musrenbang.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan musrenbang partisipasi masyarakat didesa sengonagung masih belum terpetakan, partisipasi masyarakat masih belum diketahui berada pada tingkatan rendah atau tingkatan tertinggi pada dtingkatan partisipasi yang akan diukur melalui tangga partisipasi menurut Arnstein, Dari hal tersebut peneliti merasa terdorong untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANG desa sengonagung kecamatan purwosari kabupaten pasuruan dengan melihat dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat melalui teori R Arnstein dsebut sebagai “ *ladder of participation* ” (tangga partisipasi).

Arnstein dalam muluk (2007:58-60) Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam memengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut teori ini terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci lagi dalam delapan anak tangga partisipasi. Derajat yang terendah adalah non partisipasi. Aktivitas partisipasi yang terjadi pada derajat ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipasi. Dalam derajat ini terdapat dua anak tangga, yakni manipulasi, dan terapi, Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*). keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi dari derajat sebelumnya. Praktik partisipasi dalam pemerintah daerah paling banyak terjadi pada derajat yang meliputi tiga anak tangga ini, yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentruman (*placation*) drajad ini jelas telah melibatkan aktivitas dialog dengan public yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam keputusan. Pemberian informasi menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan. Konsultasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenangan dengan masyarakat, misalnya survey sikap, temu warga, dan dengar pendapat public. Penentruman melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk

terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan.

Derajat tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung baik dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukkan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah terhadap masyarakat. Terdapat 3 anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga

Dari penjelasan diatas diharapkan peneliti dapat menemukan dan menempatkan partisipasi masyarakat desa senganagung purwosari pasuruan ke tangga partisipasi yang tepat menurut teori R Arnstein.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat beserta tangga partisipasi menurut R Arnstein dalam MUSRENBANG desa senganagung kecamatan purwosari kabupaten pasuruan ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam partisipasi masyarakat pada MUSRENBANG desa senganagung kecamatan purwosari kabupaten pasuruan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Bagaimana partisipasi masyarakat beserta tangga partisipasi menurut R arnstein dalam musrenbang desa sengonagung kecamatan purwosari kabupaten pasuruan.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apa faktor penghambat dan pendukung dalam partisipasi masyarakat pada musrenbang desa sengonagung kecamatan purwosari kabupaten pasuruan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 MANFAAT SECARA TEORITIS

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua kalangan dan memberi sumbangan pengetahuan dalam partisipasi masyarakat desa sengonagung kecamatan purwosari kabupaten pasuruan.
2. penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat desa sengonagung kecamatan purwosari kabupaten pasuruan dalam Musrenbang desa.

1.4.2 MANFAAT SECARA PRAKTIS

1. penelitian ini diharapkan mampu memperjelas tentang partisipasi masyarakat di desa sengonagung kecamatan purwosari kabupaten pasuruan.

Bagi Instansi, penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberika masukan terhadap instansi dan lembaga Bagi Penelitian Lain, penelitian yang dilakukan ini bisa dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.